

**BAB V**  
**PEMBAHASAN**

MILIK PERPUSTAKAAN  
**UNIMED**

Buruknya kondisi buruh perempuan di Serdang Bedagai diprediksi juga dihadapi oleh sebagian pekerja perempuan di Indonesia. Terutama bagi mereka yang bekerja di sektor perkebunan.

Analisis terhadap permasalahan buruh perempuan secara umum dapat dilihat dalam perspektif kondisional dan struktural. Analisis kondisional terkait dengan kondisi buruh secara keseluruhan. Selanjutnya, analisis kondisional tersebut terkait dengan analisis struktural yang lebih menekankan pada posisi buruh dalam keseluruhan struktur formasi sosial yang ada.

Persoalan tersebut secara umum sebenarnya terkait dengan ideologi patriarkhi yang juga berkembang di perusahaan perkebunan. Di dalam perkebunan ideologi patriarkhi tersebut muncul dalam bentuk pola relasi sosial yang bersifat patron klien. Pola relasi sosial bersifat hirarkhi antara majikan, dalam hal ini pihak perusahaan perkebunan dengan buruh sebagai pekerja di perkebunan.

Relasi sosial yang bersifat patron klien tersebut berdampak pula pada pembagian jenis buruh antara buruh primer dengan buruh sekunder. Buruh perempuan dalam hal ini diposisikan dalam kelompok buruh sekunder, buruh kelas dua. Memiliki status rendah dengan jaminan sosial yang rendah di dalam perusahaan perkebunan.

Struktur dan pola kebijakan perkebunan yang demikian pada proses berikutnya menjadikan posisi buruh perempuan menjadi semakin buruk, dengan memposisikan mereka sebagai buruh nomor dua dengan beban dan volume pekerjaan yang sama berat atau bahkan lebih. Pada proses berikutnya secara struktural dan kultural buruh perempuan cenderung memiliki akses yang lemah terhadap upah dan imbalan atas pekerjaan, fasilitas serta jaminan keselamatan kerja dan kesejahteraan hidup secara umum.

Ada beberapa analisis yang dapat dimunculkan dari permasalahan tersebut. Pertama, kemampuan dan kualitas tenaga kerja buruh perempuan selalu dinilai lebih rendah dari buruh laki-laki. Karena hanya mengandalkan ketelitian dan kesabaran semata. Tidak terlalu banyak menggunakan kekuatan fisik. Selanjutnya, buruh perempuan dianggap bukan pekerja keras. Sebab mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu.

Dengan menempatkan buruh perempuan sebagai buruh kelas dua, mengakibatkan buruh perempuan menjadi buruh yang terpinggirkan serta kurang diperhitungkan. Situasi ini menjadikan mereka menjadi rentan mengalami perlakuan diskriminatif. Sebagai tenaga kerja yang kurang diperhitungkan, buruh perempuan juga tidak memiliki akses yang kuat terhadap fasilitas dan jaminan sosial layaknya buruh tetap.

Melalui analisis yang demikian dipahami bahwa perlakuan diskriminatif terhadap buruh perempuan merupakan kelanjutan dan konsekuensi logis dari sistem perusahaan perkebunan yang memang memiliki orientasi keuntungan dan bersifat

eksploitatif yang bersifat struktural. Dalam pengertian proses eksploitasi yang berlangsung dan berasal dari keseluruhan struktur formasi sosial di perusahaan perkebunan. Artinya bahwa bentuk dan kondisi sosial yang dibangun di dalam perusahaan perkebunan memungkinkan dan mendukung munculnya perlakuan diskriminatif tersebut.

Sistem yang berjalan di dalam perusahaan perkebunan yang demikian melahirkan sejumlah pola regulasi dan pengaturan yang kurang memperhatikan kepentingan kaum buruh. Mulai dari pola pembagian dan penggunaan tenaga kerja. Penyediaan dan pemberian fasilitas serta jaminan sosial. Pada akhirnya pada pemberian nilai dan harga hasil pekerjaan. Keadaan yang demikian semakin sulit ketika tidak adanya wadah yang independen dan pengawasan dari pemerintah terhadap perkebunan. Banyak kebijakan perburuhan tidak berjalan di dalam sistem perusahaan perkebunan. Sebab perkebunan memiliki kebijakan tersendiri. Kebijakan untuk menciptakan kondisi perusahaan yang kondusif.

Dengan demikian perkebunan menjadi sebuah wilayah sosial yang eksklusif. Eksklusif dalam pengertian wilayah sosial yang memiliki keistimewaan tersendiri. Sangat tertutup dari pengaruh dan intervensi yang berasal dari luar sistem perkebunan. Sebab itu sistem sosial perkebunan sangat lamban dalam mengadopsi setiap tuntutan perubahan.

Karena itulah seperti disebutkan sebelumnya, sistem dan struktur sosial perkebunan relatif tidak mengalami perubahan dari sejak awal tumbuh dan perkembangannya. Meskipun secara sederhana banyak pandangan menyatakan

bahwa sistem perkebunan sudah mengalami banyak perubahan. Tetapi jika diteliti lebih dalam ke dalam sistem sosial perkebunan secara keseluruhan, tidak ada perubahan yang berarti dalam sistem sosial perkebunan.

Selanjutnya, kebijakan dan pola pengaturan dalam sistem perkebunan yang demikian pada akhirnya menjadi budaya dalam sistem sosial perkebunan yang berlangsung terus menerus. Karena itu belum ada perubahan yang signifikan bagi perubahan nasib buruh. Malahan sebagian dari kebijakan-kebijakan tersebut semakin mempersulit keberadaan buruh, dengan sangat rendahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Meskipun pemerintah telah mendapatkan masukan dan informasi tentang permasalahan tenaga kerja di sektor perburuhan.

Lemahnya kontrol dari pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak buruh terindikasi dengan tidak tegasnya sanksi atas perbuatan yang melanggar hak buruh. Sehingga posisi tawar buruh menjadi semakin lemah. Lemahnya posisi tawar buruh tersebut, salah satunya dikarenakan tidak adanya organisasi yang efektif untuk menyuarakan kepentingan buruh dan perlindungan melalui sanksi yang diberikan pemerintah atas pelanggaran terhadap hak-hak buruh.

Dengan demikian persoalan perlakuan diskriminatif terhadap buruh perempuan harus dilihat dalam bingkai yang lebih mendasar, yaitu struktur dan kultur di perkebunan. Struktur dan kultur perkebunan dibangun dengan asumsi ideologis yang bersifat patriarkhis. Struktur dan kultur perkebunan masih bias gender dalam melihat persoalan buruh perempuan. Akibatnya kebijakan dan peraturan perkebunan terhadap buruh perempuan juga bersikap diskriminatif.